

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan emisi karbon di Indonesia bukan sebuah isu baru. Peningkatan emisi karbon di Indonesia cukup membuat negara menjadikan emisi karbon sebagai suatu hal yang mesti diperhatikan. Emisi karbon merupakan gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Contoh dari emisi karbon ialah karbondioksida (CO₂), gas pembuangan dari pembakaran bensin, solar, kayu, daun, gas LPG, dan bahan bakar yang mengandung hidrokarbon lainnya. Emisi karbon berkontribusi terhadap polusi udara yang berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Jika pemanasan global ini terus terjadi, maka bencana iklim akan mengancam kehidupan kita seperti kekeringan yang berkepanjangan, intensitas hujan ekstrem, dan juga kenaikan air laut ke permukaan bumi. Oleh karena itu, Indonesia bersama 194 negara lainnya telah berkomitmen untuk melakukan aksi-aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon sebesar 29-41% pada tahun 2030 (pu.go.id, 2021).

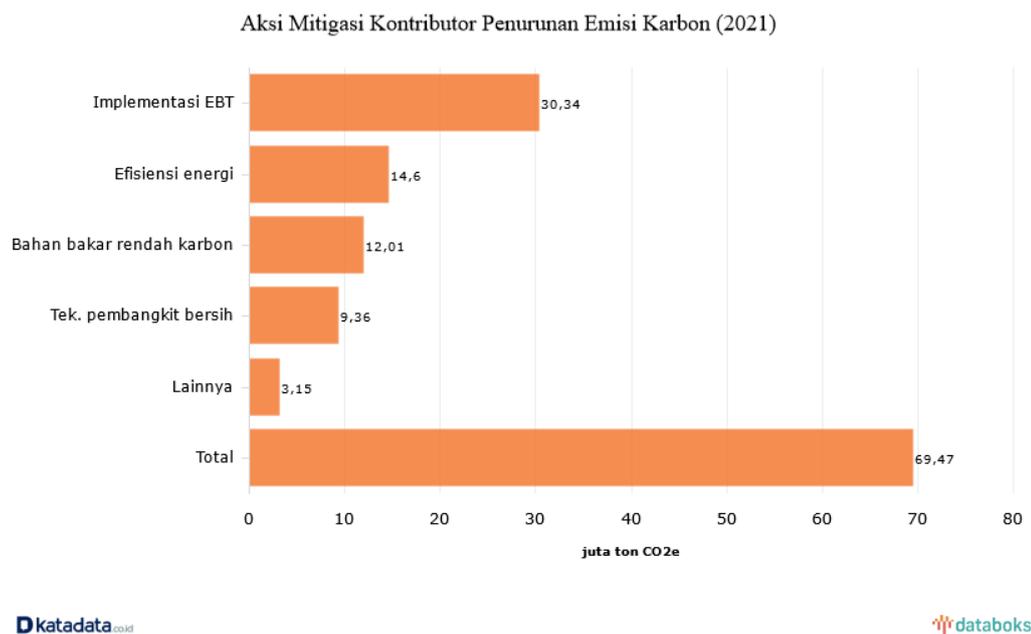
Entitas yang mempunyai pengaruh lingkungan erat kaitannya menggunakan emisi karbon yang wajib diselaraskan menggunakan acara penurunan emisi karbon baik secara internasional juga secara nasional. Meningkatnya perhatian dalam emisi karbon juga berdampak dalam pengungkapan terkait emisi karbon. Oleh karena itu, pengembangan taktik untuk menangani perkara lingkungan & pengungkapan fakta emisi sangat krusial bagi entitas sebagai gambaran perusahaan . Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan tekanan berdasarkan pemangku kepentingan terkait penggunaan etika usaha yang memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap dampak kegiatan operasi perusahaan. Sebagian besar pemangku kepentingan tidak memperdulikan akan pengungkapan emisi karbon didalam suatu perusahaan yang mereka jalani. Dalam hal ini diharapkan pemangku kepentingan juga harus turut sadar tentang penurunan emisi yang ada di suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mampu membuat para pemangku kepentingan sadar tentang pengungkapan emisi karbon. Kepemilikan manajerial, Dewan direksi,

Kepemilikan institusional merupakan bagian dari pengelolaan suatu perusahaan. Dengan 3 bagian diatas diharapkan dapat mampu mengungkapkan emisi karbon di dalam perusahaan. Disamping hal itu perusahaan juga harus memperhatikan ukuran perusahaan dan juga kinerja lingkungan dalam mengungkapkan emisi karbon. Perusahaan harus transparan dalam memberikan informasi kepada publik atas emisi karbon yang telah dilakukannya. Dengan demikian, pengujian terhadap pengungkapan emisi karbon perlu untuk diinvestigasi lebih lanjut (Firmansyah, 2021).

Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004 dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan serta turut dalam upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon juga dapat dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres No. 71 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Pada Pasal 4 Perpres No. 61 Tahun 2011 disebutkan bahwa pelaku usaha juga ikut andil dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya pengurangan emisi GRK yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pelaku usaha dapat diketahui dari pengungkapan emisi karbon (*Carbon Emission Disclosure*). Di Indonesia, praktik pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 9 secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial mengenai masalah lingkungan dan sosial.

Pada 25 September 2015 bertempat di markas besar PBB, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) sebagai kesepakatan pembangunan global yang dihadiri lebih dari 139 kepala negara termasuk Indonesia. Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita : Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun kedepan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), tujuan dari pembentukan SDGs ini adalah untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan

(sdg2030indonesia.org). Dikutip dari (databoks.co.id, 2022) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) mencatat Indonesia berhasil menurunkan emisi sebesar 69,5 juta ton CO₂ ekuivalen (CO₂e) pada 2021. Ini melebihi target Nationally Determined Contributions (NDC) yang sebesar 67 juta ton CO₂e untuk 2021. Bahan bakar rendah karbon ikut membantu mengurangi 12,01 juta ton CO₂e dan penggunaan teknologi pembangkit bersih menurunkan 9,36 juta ton CO₂e. Terakhir, kegiatan lain ikut menurunkan 3,15 juta ton CO₂e. Jika dilihat dari intensitasnya, penurunan emisi karbon Indonesia tercatat sebesar 0,256. Intensitas penurunan emisi didapat dari membagi penurunan emisi dengan jumlah penduduk suatu negara. Penurunan emisi karbon tahun lalu meningkat dari 2020 yang tercatat sebesar 64,36 juta ton CO₂e. Untuk 2022, Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon dapat mencapai 91 juta ton CO₂e.



Data diolah www.databoks.co.id

Gambar 1.1
Target Penurunan Emisi Karbon

Dalam hal ini dilansir dari (theconversation.com, 2021) pajak karbon bisa menjadi salah satu solusi bagi Indonesia untuk mencapai sustainable development goals (SDGs). Saat ini pemerintah sedang merencanakan penerapan “pajak karbon” untuk memastikan aktivitas ekonomi dan bisnis di Indonesia agar terdapat pelestarian lingkungan dan mengurangi dampak krisis iklim. Pajak karbon sendiri adalah pajak yang dikenakan pada aktivitas ekonomi yang menghasilkan emisi karbon yang melewati batas tertentu. Pajak ini juga dikenakan pada bisnis yang menghasilkan berbagai dampak buruk lain pada lingkungan. Berdasarkan hasil analisis, pengenaan pajak karbon bahkan berpotensi memberikan penerimaan tambahan bagi negara hingga Rp 57 triliun. Di sisi lain, penerapan pajak ini juga bisa membantu pemerintah mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang lebih umum dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Rencana pemerintah untuk menerapkan pajak karbon adalah sebuah lompatan besar dalam mewujudkan komitmen terkait iklim dan lingkungan yang terkandung dalam SDGs. Pemerintah sendiri telah menjabarkan tujuan jangka panjang dari SDGs yang ingin dicapai oleh Indonesia pada tahun 2030. Poin ke-13 menjelaskan target pemerintah untuk melawan dampak dari krisis iklim – salah satunya melalui penurunan emisi karbon secara jangka panjang. Tahun lalu, misalnya, pemerintah menyatakan target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Dalam hal ini, penerapan pajak karbon dapat meningkatkan partisipasi dari komunitas bisnis untuk memangkas emisi dari aktivitas ekonomi yang mereka lakukan, sekaligus menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan proksi pengungkapan emisi karbon menggunakan indeks berdasarkan penelitian (Choi, 2013) yang mengungkapkan 18 item. Perusahaan PT Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar yang ada di Indonesia. Perusahaan ini terbilang perusahaan yang cukup mendukung dalam hal pengungkapan emisi karbon. Dikutip oleh (bulelengkab.go.id, 2019) Ilmuan telah beberapa kali mengatakan bahwa Bumi sedang mengalami pemanasan global, yakni proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan di planet ini. Menurut *Intergovernmental Panel on*

Climate (IPCC), selama 3 abad terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat 1 derajat celcius. Hal ini kemungkinan besar diakibatkan oleh naiknya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Hal ini dapat menimbulkan banyak bencana alam. Perusahaan perlu memperhatikan hal ini karena dapat mengancam keberlangsungan perusahaan di masa mendatang dengan cara membantu mengurangi gas yang dihasilkan. Seperti yang dilansir pada (market.bisnis.com, 2021) Unilever Indonesia (UNVR) menargetkan Nol Emisi karbon pada tahun 2035 dengan pengurangan emisi sebesar 50% ditahun 2025. Hal ini tentu sangat mendukung pengungkapan emisi karbon karena sejak tahun 2020 lalu Unilever secara global meluncurkan rencana *climate transition and action plan* dan sebagai komitmen Unilever secara global mencapai internal operasional zero emisi di tahun 2030, dan *extended family* Unilever di tahun 2039 (market.bisnis.com, 2021). PT Unilever Indonesia juga meluncurkan *sustainability report* di pasar modal Indonesia sejak 2018. Padahal laporan tersebut baru akan diresmikan dan diwajibkan di tahun 2022. Pada hakikatnya, pemanasan global masih dapat dicegah. Setidaknya dengan cara mengurangi resiko dimasa dengan tindakan sepele seperti membuang sampah pada tempatnya dan menggunakan barang-barang ramah lingkungan.

Pengungkapan karbon tidak lepas dari isu transparansi yang dilakukan oleh perusahaan kepada publik dan ukuran perusahaan serta kinerja suatu perusahaan. Perusahaan diharapkan lebih transparan jika penerapan tata kelola yang baik diterapkan dengan cukup maksimal. Tata kelola dapat dilihat dari segi pelaksanaan item tata kelola yang ditentukan oleh otoritas tertentu yang mengatur tata kelola, atau pemantauan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap kinerja manajer di perusahaan. Item tata kelola yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan manajerial, Dewan direksi, dan juga Kepemilikan institusional. Dengan menerapkan tiga hal tersebut diharapkan dapat membuat perusahaan lebih transparansi kepada publik.

Selain itu, semakin bagus kinerja lingkungan membuktikan semakin besar tingkat PROPER, bisa meningkatkan profitabilitas (Putri et al., 2019a). Kementerian Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2013 pasal (1) mendefinisikan PROPER sebagai berikut : “ program penilaian terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.” Penerapan PROPER ini dapat menjadi salah satu indikator masyarakat atas kinerja lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan (proper.menlhk.go.id, 2020). Dalam Penelitian ini saya menambahkan Kinerja Lingkungan sebagai variabel independen karena dalam penelitian sebelumnya yaitu Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Karakteristik Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon (2019) oleh Ischazilatul Amaliyah, Badingatus Solikhah. Hasil penelitian tersebut yaitu kepemilikan institusional dan komite audit yang tinggi mampu meningkatkan pengungkapan emisi karbon. Sementara kinerja lingkungan, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, umur dewan direksi, dan tingkat pendidikan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian ini menggunakan sampel dari semua perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan sustainability report. Sehingga dalam hal ini diharapkan dengan adanya kinerja lingkungan yang digunakan dalam sampel perusahaan manufaktur yang mempublikasikan annual report secara berturut-turut dengan pengujian yang berbeda dari sebelumnya agar dapat mengungkapkan emisi karbon dalam penelitian ini.

Penelitian sebelumnya yaitu tentang Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Di Indonesia (2021) oleh Amrie Firmansyah, Pramuji Handra Jadi, Wahyudi Febrian, Deddy Sismanyudi. Hasil penelitian tersebut adalah Perusahaan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap industrialisasi, yang menghasilkan pemanasan global dan perubahan iklim di dunia. Kondisi ini dapat mengancam masa depan dunia, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian kali ini variabel independennya ditambahkan kinerja lingkungan, penambahan kinerja lingkungan dalam penelitian ini juga dikarenakan terdapat replikasi dalam penelitian Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Karakteristik Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon (2019) oleh Ischazilatul Amaliyah, Badingatus Solikhah. Dalam penelitian tersebut kinerja lingkungan dihitung menggunakan sistem PROPER. Pada penelitian ini juga menggunakan aplikasi SPSS dengan analisis regresi berganda sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan E-views dengan analisis data panel.

Mengetahui klasifikasi diatas bahwa dengan adanya pengungkapan emisi karbon diharapkan perusahaan lebih transparan terhadap publik yang mendukung keberlangsungan suatu perusahaan untuk mendapatkan citra baik dan tujuan yang tercapai. Berdasarkan gambaran dan fenomena yang terjadi saat ini serta hal lain yang mempengaruhinya maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2020)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan terarah maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu :

1. Perusahaan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.
2. Perusahaan manufaktur yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu perusahaan yang menerapkan tentang tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon.
3. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pengungkapan Emisi Karbon dan untuk variabel independen yang akan diteliti adalah tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan dan kinerja lingkungan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon ?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon ?
5. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti dapat mengambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan emisi karbon.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan emisi karbon.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dibidang keuangan. Untuk menambah pemahaman serta lebih mendukung teori-

teori yang telah ada berkaitan dengan masalah yang telah diteliti serta untuk mengimplementasikan dan memperkaya ilmu yang lebih di dapat di bangku perkuliahan.

1.5.2. Manfaat Bagi Institusi

Menambah pembelajaran mahasiswa untuk mencari materi tugas akhir pada perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya.

1.5.3. Manfaat Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan memberika gambaran secara garis besar mengenai pembahasan dalam penelitian ini dengan sistematika penulisan yang terdiri dari berbagai bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menggambarkan tentang penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan tentang “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2018-2020)”.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Teori yang digunakan harus mendukung penelitian yang dibuat oleh peneliti. Hipotesis penelitian juga dirumuskan dalam bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, biasanya berisi tentang bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara operasional, yang terdiri dari sumber dan jenis data yang digunakan. Metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, serta teknik dan langkah analisis selanjutnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian pokok dari penelitian. Dalam bab ini disajikan hasil, implementasi, analisis dan pembahasan penelitian. Hasil dan implementasi dapat berupa gambar alat/program dan aplikasinya. Untuk penelitian lapangan hasil dapat berupa data (kualitatif maupun kuantitatif). Analisis dan pembahasan berupa hasil pengolahan data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menyajikan secara singkat apa saja yang telah diperoleh dari pembahasan. Peneliti menarik kesimpulan dari apa yang telah di bahas dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran yang baik bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang sumber jurnal ilmiah/ artikel ilmiah yang digunakan sebagai bahan penelitian yang menjadi referensi dalam pembahasan penelitian.

LAMPIRAN

Bagian ini berisikan tentang data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan dan uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya yang biasanya dapat berupa tabel atau gambar.